

## PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN JEMBER

**Dinna Tri Yulihantini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

*dinna.triyuli@gmail.com*

**Hari Sukarno**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

*harisukarno2003@gmail.com*

**Siti Maria Wardayati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

*sitimariawardayati@gmail.com*

**Abstract:** *This study aims to analyze the village financial independence and village financial performance in Jember Regency. In specific, this study analyzes the influence of capital expenditure and Village Fund Allocation (ADD), as the components of Village Government Budget (APBDes), on village financial performance in terms of its effectiveness and efficiency. This study used secondary data in the form of Realization Reports of APBDes that were collected from the 53 villages for the period of 2015-2016. Data were analyzed using path analysis. Results of the study indicate that capital expenditure and ADD have no influences on the independence of village financial performance, capital expenditure has a negative effect on the effectiveness of village financial performance, while ADD and the independence of village financial performance have no significant effects on the effectiveness of village financial performance. In terms of efficiency, capital expenditure has a negative effect on village financial performance, while ADD has a positive effect on village financial performance. Village financial independence has no effect on the efficiency of village financial performance.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Village Fund Allocation, Village Financial Independence, Effectiveness and Efficiency of Village Financial Performance.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian dan kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terhadap kinerja keuangan desa, ditinjau dari aspek efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes di 53 desa di wilayah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015-2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan ADD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa, belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan pemberian ADD dan kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa. Berkenaan dengan efisiensi, belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan ADD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa. Kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Alokasi Dana Desa, Kemandirian Keuangan Desa, Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Desa.

## Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat terkecil di Indonesia adalah desa. Penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Tujuan pembangunan dengan manajemen yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian, 2010:52).

Halim (2014:52) menyatakan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas, efisiensi dan aktifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah serta mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah.

Komponen APBDes yang diukur antara lain penerimaan desa dan belanja desa. Belanja modal desa merupakan belanja desa yang diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, gedung, irigasi dan sebagainya (Halim, 2014:234). Jenis alokasi belanja modal dalam belanja desa terdapat pada setiap program kegiatan yang tertuang dalam APBDes dengan komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya (Abidin, 2015).

Hasil penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan positif sedangkan penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian Darwis (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Prasetyanto (2012) menemukan bahwa ADD mampu meningkatkan kinerja fiskal dan Asni (2013) membuktikan bahwa ADD mampu menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.

Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat melebihi 12 bulan dalam kegiatan pemerintahan seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja modal membutuhkan anggaran yang tidak sedikit (Permenkeu Nomor 101/PMK.02/2011). Apabila suatu desa tidak dapat membiayai belanjanya sendiri akan dibantu dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Kemandirian keuangan desa berkaitan dengan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa sehingga penyerapan belanja modal yang baik akan membantu pemerintah desa meningkatkan kemandirian keuangan desa dan kinerja keuangan desa semakin efektif. Hal ini didukung dengan penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) yang menemukan bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Darwis (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal yang besar merupakan pencerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dibangun. Hasil yang semakin besar dalam merealisasikan belanja modal berarti pula realisasi anggaran yang semakin tinggi. Perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi ini maka penilaian kinerja dapat ditentukan. Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menemukan bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Salah satu penyumbang penerimaan desa terbesar selain Dana Desa (DD) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber ADD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami penundaan pencairan untuk pemerintah Kabupaten Jember karena penyerapan anggaran kabupaten yang masih rendah (Wirawan, 2016). Penundaan DAU dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah ADD

yang diberikan pada setiap desa di Kabupaten Jember sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan desa.

Selanjutnya efektivitas kinerja keuangan desa adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Belanja modal merupakan komponen APBDes yang mempunyai komposisi besar dan diasumsikan mempunyai *multiplier effect* bagi pembangunan desa. Belanja modal akan mempengaruhi tingkat efektifitas kinerja keuangan desa. Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Mardiasmo (2007:134) menyimpulkan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu alokasi anggaran yang bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka memberdayakan masyarakat desa dan perbaikan taraf hidupnya adalah ADD. Efektifitas kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi ADD yang maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Penelitian yang mendukung adanya pengaruh ADD terhadap perekonomian daerah yaitu Prasetyanto (2012) yang menemukan bahwa ADD berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan.

Pengelolaan ADD yang baik menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan dan akan mewujudkan kemandirian keuangan sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang. Hal ini didukung dengan penelitian Asni (2013) yang menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah (Utama, 2008). Desa yang mampu membiayai belanjanya sendiri dapat dikatakan desa yang sudah mandiri. Belanja modal membutuhkan anggaran yang besar tetapi apabila alokasi anggarannya berkurang akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Penelitian yang mendukung yaitu Darwis (2015) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



Efisiensi kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui rasio efisiensi yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja (Utama, 2008). Pasal 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan ADD akan meningkatkan kinerja keuangan desa. Penelitian Prasetyanto (2012) tentang pengaruh ADD terhadap perekonomian daerah menemukan bahwa ADD berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Pendapatan desa sangat menentukan kemandirian keuangan desa. Desa yang mampu membiayai pembangunannya sendiri dengan mengandalkan pendapatannya dikategorikan desa mandiri. Keberhasilan pelaksanaan ADD ditandai dengan realisasi belanja desa yang optimal membuktikan bahwa kinerja keuangan desa yang efisien. Penelitian Asni (2013) menemukan bahwa dengan adanya program ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember maka perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah belanja modal dan ADD berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember melalui kemandirian keuangan desa.

## **Metodologi**

Jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data realisasi APBDes di Kabupaten Jember. Untuk memperoleh seluruh data realisasi APBDes di Kabupaten Jember ditemukan kendala adanya data yang tidak bisa diperoleh sehingga digunakan sampel. Metode *sampling* menggunakan *Convenience Sampling*. Pengambilan sampel menggunakan data sampai batas yang bisa diperoleh yaitu data realisasi APBDes periode Tahun Anggaran 2015-2016 di 53 desa di wilayah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Jember. Data sekunder

berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di 53 Desa di wilayah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015-2016 dan data lain yang terkait.

#### Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Berikut adalah definisi masing-masing variabel penelitian :

- a. Belanja Modal (BM) adalah belanja langsung yang dianggarkan untuk menambah aset berupa sarana dan prasarana desa di wilayah Kabupaten Jember yang dinyatakan dengan skala rasio.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Jember untuk wilayah desa di Kabupaten Jember yang disesuaikan ketentuan yang berlaku yang dinyatakan dalam skala rasio.
- c. Kemandirian Keuangan Desa (KKD) adalah kemampuan pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam membiayai pembangunannya sendiri diukur dengan rasio kemandirian yaitu membandingkan pendapatan asli desa dengan total pendapatan desa dan dinyatakan dalam bentuk skala rasio.
- d. Kinerja Keuangan Desa (KK) merupakan pengukuran kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember yang menitikberatkan pada efektifitas kinerja keuangan desa yang diukur dengan rasio efektifitas (KKef) dan efisiensi terhadap kinerja keuangan desa yang diukur dengan rasio efisiensi (KKefi) dan dinyatakan dengan skala rasio.

#### Metode Analisis Data

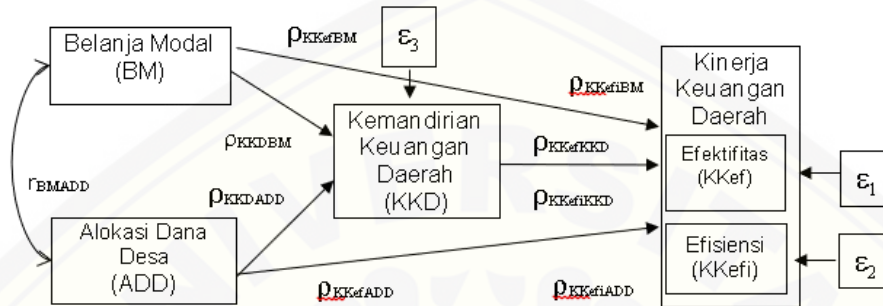
- a. Penentuan masing-masing variabel penelitian antara lain :
  1. Menentukan nilai variabel bebas yang terdiri dari variabel belanja modal yaitu sama dengan data realisasi belanja modal desa di Kabupaten Jember dan variabel ADD yaitu sama dengan data realisasi ADD di setiap desa di Kabupaten Jember.
  2. Menentukan variabel terikat dan variabel antara (*intervening*) menggunakan rumus rasio keuangan antara lain rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan PAD terhadap total pendapatan dikali seratus persen, rasio efektifitas kinerja keuangan daerah yaitu perbandingan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan dikali seratus persen dan rasio efisiensi keuangan daerah yaitu perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran belanja dikali seratus persen (Utama, 2008).

b. Analisis Jalur

1. Menentukan Jalur

Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh belanja modal dan ADD terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember melalui *intervening variabel* kemandirian keuangan desa.

Model analisis jalur disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

**Hasil dan Pembahasan**

Hasil Analisis Data

Masing-masing jalur diuji untuk mewakili hipotesis penelitian ini. Hasil pengujian berorientasi pada kemandirian keuangan desa dijelaskan Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Kemandirian Keuangan Desa

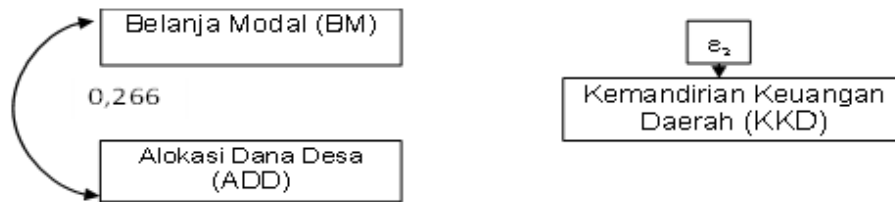
Variabel	B	Standart Error	Beta	t	Sig
BM	- 5,145E-11	0,00	-0,100	-1,005	0,317
ADD	-1966E-11	0,00	-0,113	-1,133	0,260

Sumber : data diolah

Persamaan Analisis Jalur berioentasi pada kemandirian keuangan desa :

$$KKD = \rho_{KKDBM} BM + \rho_{KKDADD} ADD + \epsilon_3 = -0,100 BM - 0,113 ADD$$

Setelah mengetahui persamaan jalur, berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pengujian jalur BM ke KKD tidak signifikan. Pengujian jalur ADD ke KKD diperoleh hasil tidak signifikan. Oleh karena koefisien jalur dari BM ke KKD dan ADD ke KKD tidak signifikan maka perlu dilakukan *Trimming Theory*. Implikasinya mengalami perubahan yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD ke KKD setelah *trimming*

Persamaan Analisis Jalur setelah *trimming* adalah:

$$KKD = \rho_{KKDBM} BM + \rho_{KKDADD} ADD + \varepsilon_3$$

= Tidak Ada karena jalur BM ke KKD tidak signifikan

Jalur BM ke KKD dan BM melalui ADD tidak mempunyai pengaruh terhadap KKD. Jalur selanjutnya berorientasi terhadap efektifitas kinerja keuangan desa. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Variabel	B	Standart Error	Beta	t	Sig
BM	- 1,892E-11	0,00	-0,212	-2,133	0,035
ADD	- 1,360E-11	0,00	-0,045	-0,449	0,654
Rasio KKD	-0,006	0,17	-0,036	-0,365	0,716

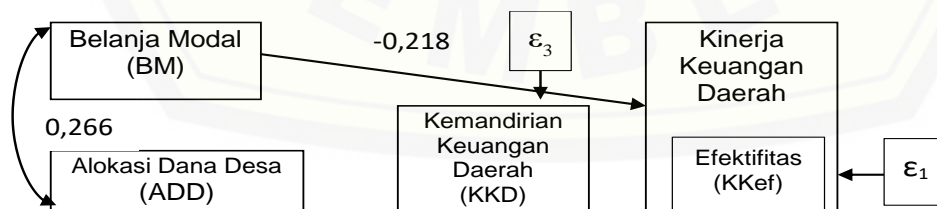
Sumber : data diolah

Persamaan Jalur yang beorientasi pada efektifitas kinerja keuangan desa :

$$KK_{ef} = \rho_{KK_{ef}BM} BM + \rho_{KK_{ef}ADD} ADD + \rho_{KK_{ef}KKD} KKD + \varepsilon_1$$

$$KK_{ef} = - 0,212 BM - 0,036 ADD - 0,045 KKD$$

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pengujian jalur BM ke  $KK_{ef}$  diperoleh hasil signifikan. Pengujian jalur ADD ke  $KK_{ef}$  dan jalur KKD ke  $KK_{ef}$  menunjukkan hasil tidak signifikan. Oleh karena koefisien jalur dari ADD ke  $KK_{ef}$  dan KKD ke  $KK_{ef}$  tidak signifikan maka perlu dilakukan *Trimming Theory*. Implikasinya mengalami perubahan disajikan oleh Gambar 3.



Gambar 3 : Diagram Jalur hubungan kausal BM, ADD, KKD ke  $KK_{ef}$  setelah *trimming*

Persamaan Jalur setelah *trimming* adalah

$$KK_{ef} = \rho_{KK_{ef}BM} BM + \rho_{KK_{ef}ADD} ADD + \rho_{KK_{ef}KKD} KKD + \varepsilon_1 = - 0,218 BM$$



Tabel 3. Hasil Pengujian Analisis Jalur setelah *Trimming*

Variabel	B	Standart Error	Beta	t	Sig
BM	-1,942E-11	0,000	-0,218	-2,278	0,025

Sumber : data diolah

Berdasarkan pengaruh langsung BM terhadap KKef bernilai 4,75% sedangkan jalur BM ke KKef tidak berpengaruh baik melalui ADD maupun KKD. BM berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas kinerja keuangan desa tetapi tidak berpengaruh melalui ADD maupun kemandirian keuangan desa. Jalur ADD secara langsung ataupun melalui BM dan KKD tidak berpengaruh terhadap KKef. Jalur yang berorientasi pada efisiensi kinerja keuangan desa menunjukkan hasil pengujian pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

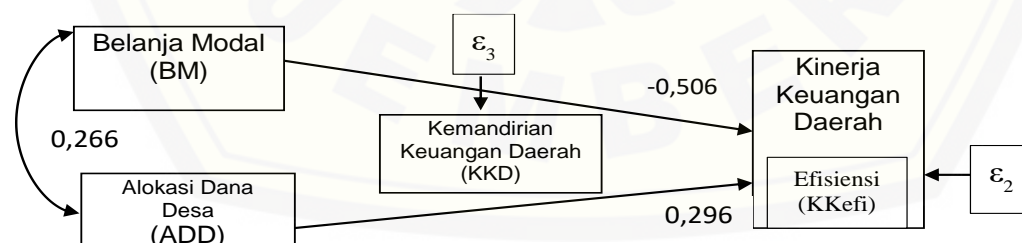
Variabel	B	Standart Error	Beta	t	Sig
BM	-3,774E-11	0,000	-0,492	-5,732	0,000
ADD	8,149E-11	0,000	0,312	3,627	0,000
Rasio KKD	,021	0,013	0,139	1,646	0,103

Sumber : data diolah

Persamaan Jalur yang berorientasi pada efisiensi kinerja keuangan desa :

$$\begin{aligned} KK_{\text{efi}} &= \rho_{KK_{\text{efi}}BM}BM + \rho_{KK_{\text{efi}}ADD}ADD + \rho_{KK_{\text{efi}}KKD}KKD + \varepsilon_2 \\ &= -0,492BM + 0,312ADD + 0,139KKD \end{aligned}$$

Setelah mengetahui persamaan jalur, hasil uji t menunjukkan bahwa pengujian jalur BM ke KKefi dan jalur ADD ke KKefi diperoleh hasil signifikan. Pengujian KKD ke KKefi diperoleh hasil tidak signifikan. Oleh karena koefisien jalur dari KKD ke KKefi tidak signifikan maka perlu dilakukan *Trimming Theory*. Implikasinya mengalami perubahan disajikan Gambar 4.



Gambar 4 : Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD, KKD ke KKefi setelah *Trimming*

Persamaan Jalur setelah *trimming* adalah

$$KK_{\text{efi}} = \rho_{KK_{\text{efi}}BM}BM + \rho_{KK_{\text{efi}}ADD}ADD + \rho_{KK_{\text{efi}}KKD}KKD + \varepsilon_2 = -0,506 BM + 0,296ADD$$

Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Jalur setelah *Trimming*

Variabel	B	Standart Error	Beta	t	Sig
BM	-3,881E-11	0,000	-0,506	- 5,874	0,000
ADD	7,739E-11	0,000	0,296	3,437	0,001

Sumber : data diolah

Belanja modal berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung melalui ADD terhadap efisiensi kinerja keuangan desa. Berdasarkan perhitungan tidak ada pengaruh langsung dan tidak langsung KKD ke KKefti.

#### Pengaruh Belanja Modal terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Belanja modal dalam mempengaruhi efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember berpengaruh negatif artinya jika belanja modal meningkat justru menunjukkan efektifitas kinerja keuangan yang menurun dan sebaliknya. Belanja modal yang makin besar tidak diikuti oleh peningkatan relatif realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan. Hal ini dikarenakan realisasi belanja modal yang sudah optimal tidak diikuti pengelolaan yang baik sehingga manfaat yang diharapkan tidak membantu meningkatkan pendapatan desa.

#### Pengaruh ADD terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Peran ADD baik langsung maupun tidak langsung melalui hubungan korelasional dengan belanja modal tidak mempengaruhi efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Artinya ditinjau dari efektifitas kinerja keuangan desa, ADD tidak menentukan peningkatan relatif realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa. Hal ini dikarenakan ADD merupakan wujud nyata pemenuhan hak desa dalam membiayai program pemerintahan desa guna melaksanakan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di desa, mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat desa. ADD digunakan untuk pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan pengembangan desa bukan diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan desa.

#### Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Belanja modal melalui kemandirian keuangan desa tidak mempengaruhi terciptanya peningkatan relatif realisasi anggaran terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kemandirian tidak tergantung pada belanja modal dalam mewujudkan kinerja keuangan desa yang efektif. Rasio kemandirian keuangan desa yang rendah menjadikan belanja modal tidak berperan menentukan

efektifitas kinerja keuangan desa. Anggaran belanja modal pada desa yang mandiri atau belum mandiri tidak berdampak pada besarnya realisasi pendapatan dibandingkan anggaran pendapatan desa.

#### Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

ADD melalui kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Kemandirian keuangan desa tidak berdampak terhadap kinerja keuangan desa dilihat dari perbandingan PADes yang diterima dengan total pendapatan desa. Kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember tidak mempunyai peran dalam membantu ADD mencapai efektifitas kinerja keuangan desa. Pemberian ADD tidak mempertimbangkan kemandirian keuangan desa sehingga tidak berkorelasi dalam peningkatan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa.

#### Peran Belanja Modal terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal yang sudah direalisasikan dengan optimal berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan desa. Semakin besar belanja modal yang dianggarkan menurunkan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa. Berarti manfaat penggunaan belanja modal kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kinerja sumberdaya manusia yang kurang maksimal dalam mengelola belanja modal tersebut.

#### Pengaruh ADD terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

ADD mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan relatif realisasi belanja desa terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah desa. ADD di Kabupaten Jember mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi kinerja keuangan desa. Artinya bahwa ADD yang diberikan pada desa di Kabupaten Jember sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan realisasi belanja desa terhadap anggaran belanjanya. Penundaan dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak mengubah prioritas perencanaan APBD Kabupaten Jember dalam pemberian ADD.

### Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional Belanja Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Belanja modal melalui kemandirian keuangan desa tidak mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Kemandirian keuangan desa tidak berperan pada belanja modal dalam rangka menghasilkan peningkatan realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa.

### Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Pengaruh ADD melalui kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember menunjukkan hasil tidak signifikan. Artinya kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember tidak mempengaruhi ADD mencapai peningkatan relatif realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa.

### **Kesimpulan**

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD tidak mempunyai dampak terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. Jumlah ADD yang diterima dan direalisasikan desa tidak membantu mencapai kemandirian keuangan desa. Belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. belanja modal melalui ADD tidak dapat menentukan efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa baik langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal desa. Kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember tidak berperan dalam mewujudkan efektifitas kinerja keuangan desa.

Belanja modal baik langsung maupun tidak langsung melalui ADD berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian, yaitu : (a) penelitian selanjutnya menambah waktu penelitian dan memilih waktu yang tepat untuk penelitian sehingga pengumpulan data dapat dilakukan sesuai tujuan



penelitian; (b) memperluas sampel penelitian hendaknya dengan membandingkan antar desa diluar wilayah Kabupaten Jember sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

### Daftar Referensi

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 6 Juni 2015, PP 61-76.
- Alfiah, Ikmal Fitriyani. 2016. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Thesis*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Asni, Fauzi, Maryunani dan Sasongko. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668*. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Public Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Darwis, 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang vol 3(1)*.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: ANDI
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting vol.1 No. 1 page 47-59*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 27 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011. *Klasifikasi Anggaran*. 11 Juli 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. Jakarta
- Prasetyanto, Eko. 2012. Dampak alokasi dana desa pada era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian daerah di Indonesia. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Puspitasari, Ni Luh Putu. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha vol. 3(1)*.
- Sukarni, Ni Wayan. 2016. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana:545-572*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Utama, Made Suyana. 2008. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Fakultas Ekonomi Udayana*.

Wirawan, Oryza. 2016. *Belanja Modal APBD Jember 2015 Tak Terealisasi 23 Persen*. [beritajatim.com](http://beritajatim.com). Diakses tanggal 21 September 2016.

